

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 selesai disusun dan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif ataupun diukur dari sisi efektivitas, dan efisiensi serta ekonomisnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peranan penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, khususnya upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memerlukan suatu perencanaan yang strategis pada setiap program dan kegiatan agar apa yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan sasaran. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman yang matang dan terarah serta usaha maksimal di setiap aparat, untuk berkomitmen mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan hasil akhir kegiatanyang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2018 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja guna mencapai visi, misi, program, kegiatan dan kebijakan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (Good Governance). Menggambarkan tingkat pencapaian kinerja keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari adanya keterbatasan penyusunan laporan, oleh karenanya saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan.

Sampit, Februari 2019

Plt. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

H.NUR ASWAN, SH
Pembina Utama Muda/(IV/c)
NIP. 19601104 198511 1 001